

Implementasi Digitalisasi Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung: Studi Praktik Kerja Lapangan

Fadilla Nur Octaviani¹, Firman Yudhanegara²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Negara Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: fadillanuroctaviani80@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 03-07-2026
Disetujui 10-07-2026
Diterbitkan 12-07-2026

ABSTRACT

The digitalization of financial administration is one of the government's strategies to improve the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of regional financial management. The Bandung City Transportation Agency has implemented digital-based administrative systems to support integrated financial document management and administrative processes. This study aims to describe the implementation of digital financial administration at the Bandung City Transportation Agency through an Internship Program. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through direct observation during the internship, documentation, and relevant literature review. The findings indicate that the implementation of a digital financial administration system has accelerated administrative processes, facilitated financial document management, improved the accuracy of financial recordkeeping, and strengthened coordination among departments. However, several challenges remain, including limited user understanding of the system and the need to enhance human resource competencies in utilizing information technology. Therefore, continuous training and optimization of digital system utilization are essential to support more effective, efficient, transparent, and accountable financial administration.

Keywords: Digital Financial Administration ; Internship Program; Transportation Agency

ABSTRAK

Digitalisasi administrasi keuangan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah memanfaatkan sistem administrasi berbasis digital untuk mendukung pengelolaan dokumen dan proses administrasi keuangan secara lebih terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi digitalisasi administrasi keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung selama pelaksanaan PKL, dokumentasi, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi keuangan berbasis digital mampu mempercepat proses administrasi, mempermudah pengelolaan dokumen keuangan, meningkatkan ketepatan pencatatan, serta memperkuat koordinasi antarbagian. Meskipun demikian, implementasi sistem masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem dan perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan sistem digital diperlukan untuk mendukung pengelolaan administrasi keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Katakunci: Digitalisasi Administrasi Keuangan; Praktik Kerja Lapangan; Dinas Perhubungan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Octavian, F. N., & Yudhanegara, F. . (2026). Implementasi Digitalisasi Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung: Studi Praktik Kerja Lapangan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 7749-7758. <https://doi.org/10.63822/wrfqzn87>

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi digital menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola melalui penerapan sistem berbasis teknologi yang mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintah daerah, teknologi informasi dimanfaatkan tidak hanya untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Digitalisasi administrasi keuangan diharapkan dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan akurasi pemrosesan data, mempermudah penyimpanan dokumen, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, sehingga pada akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Administrasi keuangan merupakan fungsi krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan administrasi keuangan yang efektif berdampak pada kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan teknologi informasi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan guna memastikan proses administrasi berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus meminimalkan kesalahan pencatatan dan risiko hilangnya dokumen. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperbaiki kualitas data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan teknologi digital dalam administrasi keuangan tidak selalu mengharuskan penggunaan sistem informasi yang kompleks. Di tingkat instansi pemerintah daerah, digitalisasi dapat dicapai dengan memanfaatkan aplikasi pendukung seperti Microsoft Excel. Aplikasi ini digunakan untuk entri data, penyimpulan data, pengelolaan dokumen, dan pengarsipan elektronik. Microsoft Excel memfasilitasi pemrosesan data keuangan, sehingga alur kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Selain itu, Microsoft Excel banyak digunakan oleh instansi pemerintah karena kemudahan penggunaan, fleksibilitas, serta kemampuannya dalam mendukung berbagai kebutuhan administrasi keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik spesifik organisasi.

Salah satu dokumen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen ini memegang peranan krusial dalam kegiatan pengelolaan keuangan, karena menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Ketepatan dalam proses input, verifikasi, penyimpanan, dan pengarsipan dokumen SPM sangatlah penting bagi efektivitas administrasi keuangan di instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan solusi digital dalam pengelolaan SPM dapat meningkatkan efisiensi administrasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempermudah akses terhadap dokumen saat dibutuhkan.

Sebagai instansi pemerintah daerah, Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan berbagai tugas pengelolaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan program dan fungsinya. Pada Subbagian Keuangan, tugas-tugas administratif memanfaatkan perangkat digital—seperti Microsoft Excel—untuk mempermudah input data dan penataan catatan keuangan, termasuk dokumen SPM. Selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung dari tanggal 5 Januari 2026 hingga 5 Februari 2026, penulis berkesempatan untuk mengamati langsung prosedur administrasi keuangan tersebut. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penggunaan perangkat digital, bahkan yang sederhana sekalipun, sangatlah vital untuk meningkatkan ketepatan administrasi, mempercepat pemrosesan dokumen, serta meningkatkan efisiensi operasional di lingkungan Subbagian Keuangan.

Meskipun banyak instansi pemerintah telah mengadopsi digitalisasi dalam bidang pengelolaan keuangan, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilannya masih bergantung pada sejumlah faktor, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi secara efektif. Selain itu, sebagian besar penelitian yang ada selama ini lebih banyak berfokus pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau kerangka kerja pengelolaan keuangan secara menyeluruh di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sebaliknya, pembahasan mengenai pelaksanaan digitalisasi pengelolaan keuangan di tingkat satuan kerja perangkat daerah—yang didasarkan pada pengalaman praktis di lapangan, khususnya terkait penanganan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) di Dinas Perhubungan Kota Bandung—masih sangat terbatas. Kondisi ini menjadi landasan penting bagi penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai pelaksanaan digitalisasi pengelolaan keuangan di tingkat operasional serta mengidentifikasi berbagai manfaat dan kendala yang dihadapi dalam proses administrasi keuangan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi keuangan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh **Muttaqin, Adiranti, dan Zakiyah (2023)** mengenai penerapan SIPD pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, keberhasilan implementasi sistem masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antarpengguna, serta dukungan kebijakan organisasi.

Selanjutnya, penelitian **Rezkiaty, Alam, dan Tenriwaru (2023)** mengenai evaluasi implementasi SIPD pada BKAD Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa sistem telah berjalan dengan baik dan mendukung penyusunan laporan keuangan daerah secara lebih efektif. Akan tetapi, penelitian tersebut menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar implementasi sistem dapat berjalan secara optimal.

Penelitian yang lebih baru dilakukan oleh **Septiani dan Isnawaty (2025)** mengenai efektivitas SIPD pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa kesalahan input manual, keterbatasan fitur dibandingkan sistem sebelumnya, serta ketidakstabilan server yang memengaruhi efektivitas penggunaan sistem.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa digitalisasi administrasi keuangan melalui penerapan sistem informasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, implementasi digitalisasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau organisasi serupa yang bertugas mengelola keuangan daerah. Studi-studi tersebut biasanya menyoroti evaluasi sistem, efektivitas adopsi SIPD, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem tersebut.

Sebaliknya, penelitian ini mengkaji transisi menuju administrasi keuangan digital di Sub-bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung, dengan memanfaatkan pengalaman yang diperoleh selama Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kajian ini tidak hanya mencakup penerapan perangkat digital dalam tugas administrasi keuangan, tetapi juga menyajikan gambaran mendalam mengenai penanganan dokumen Surat

Perintah Membayar (SPM)—khususnya terkait input dan penyimpanan data—menggunakan Microsoft Excel. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai digitalisasi administrasi keuangan pada tingkat operasional di instansi pemerintah daerah, sebuah topik yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi digitalisasi administrasi keuangan pada Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung?
2. Bagaimana pemanfaatan Microsoft Excel dalam mendukung proses administrasi dan pengarsipan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi administrasi keuangan pada Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi digitalisasi administrasi keuangan pada Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2. Menganalisis pemanfaatan Microsoft Excel dalam mendukung administrasi dan pengarsipan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Mengidentifikasi manfaat serta kendala yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi administrasi keuangan pada Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi digitalisasi administrasi keuangan pada Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena sosial melalui pengumpulan data secara langsung pada kondisi alamiah. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai sesuai untuk menggambarkan proses administrasi keuangan yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Penelitian dilaksanakan di Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang berlangsung pada 5 Januari 2026 sampai dengan 5 Februari 2026. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan unit kerja yang melaksanakan berbagai aktivitas administrasi keuangan, khususnya proses input data dan pengarsipan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) menggunakan Microsoft Excel sebagai media pendukung administrasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas administrasi keuangan selama pelaksanaan PKL. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan, arsip administrasi, regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, serta berbagai jurnal ilmiah,

buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, **observasi**, yaitu pengamatan secara langsung terhadap proses administrasi keuangan, khususnya kegiatan input data dan pengarsipan dokumen SPM menggunakan Microsoft Excel. Kedua, **dokumentasi**, yaitu pengumpulan berbagai dokumen administrasi, arsip, format kerja, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi keuangan. Ketiga, **studi literatur**, yaitu mengkaji buku, artikel ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas digitalisasi administrasi, administrasi keuangan pemerintah, serta pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar teoritis penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh **Miles, Huberman, dan Saldaña (2014)**, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil observasi, dokumentasi, serta studi literatur sesuai dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif sehingga informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap hasil penelitian yang didukung oleh data yang telah diverifikasi sehingga menghasilkan gambaran mengenai implementasi digitalisasi administrasi keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi selama pelaksanaan PKL, dokumen administrasi yang tersedia, serta informasi yang diperoleh dari studi literatur. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Penelitian ini berfokus pada implementasi digitalisasi administrasi keuangan pada Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung, khususnya dalam kegiatan input data dan pengarsipan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) menggunakan Microsoft Excel selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung pada periode 5 Januari 2026 sampai dengan 5 Februari 2026. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas administrasi keuangan, dokumentasi, dan studi literatur yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi keuangan di lingkungan pemerintahan. Pembahasan difokuskan pada implementasi digitalisasi administrasi keuangan dalam mendukung pengelolaan dokumen **Surat Perintah Membayar (SPM)** melalui kegiatan input data dan pengarsipan menggunakan **Microsoft Excel**. Selain itu, bagian ini juga menguraikan manfaat yang diperoleh, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan administrasi, serta mengaitkan hasil temuan dengan teori dan penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan digitalisasi administrasi keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Implementasi Digitalisasi Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan mengacu pada penerapan teknologi untuk meningkatkan fungsi administratif di lingkungan instansi pemerintah, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di instansi pemerintah, integrasi solusi digital tidak

selalu melibatkan sistem informasi yang rumit; hal ini dapat dicapai dengan menggunakan perangkat lunak dasar seperti Microsoft Excel untuk membantu pendokumentasian, pengelolaan data, dan penyimpanan arsip administrasi keuangan. Pemanfaatan alat ini berkontribusi pada peningkatan kualitas administrasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mengefisienkan penataan dan akses terhadap dokumen.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2026 hingga 5 Februari 2026. Selama periode tersebut, penulis dapat mengamati secara langsung proses administrasi keuangan serta terlibat dalam kegiatan administratif penting terkait penanganan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM). Tugas-tugas tersebut meliputi entri data menggunakan Microsoft Excel dan pengorganisasian dokumen SPM berdasarkan klasifikasi belanja. Pengalaman ini memberikan wawasan mengenai bagaimana solusi digital diterapkan pada tingkat operasional dalam administrasi keuangan instansi pemerintah daerah.

Pada proses input data, Microsoft Excel dimanfaatkan sebagai media untuk mencatat informasi administrasi yang berkaitan dengan dokumen SPM. Data yang diinput meliputi **tanggal** dan **nama kegiatan** sesuai dengan dokumen yang telah diterima oleh Subbagian Keuangan. Pencatatan dilakukan secara sistematis agar data tersusun dengan rapi dan mudah diperbarui apabila terdapat perubahan. Penggunaan Microsoft Excel juga memudahkan proses penyusunan data karena informasi dapat dikelompokkan dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dibaca, diperiksa, dan digunakan kembali apabila diperlukan.

Selain kegiatan input data, penulis juga melaksanakan proses **pengarsipan dokumen SPM**. Pengarsipan dilakukan dengan mengelompokkan dokumen berdasarkan **jenis belanja** sehingga setiap dokumen tersusun secara sistematis. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pencarian dokumen ketika diperlukan kembali dalam kegiatan administrasi maupun pemeriksaan. Pengarsipan yang dilakukan secara terstruktur juga membantu menjaga keamanan dokumen, mengurangi risiko kehilangan arsip, serta mendukung tertib administrasi pada Subbagian Keuangan.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan PKL, penggunaan Microsoft Excel memberikan beberapa kemudahan dalam pelaksanaan administrasi keuangan. Proses pencatatan data menjadi lebih cepat dibandingkan pencatatan secara manual karena informasi dapat langsung dimasukkan ke dalam lembar kerja digital. Selain itu, perubahan data dapat dilakukan tanpa harus membuat dokumen baru sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Fitur pengelompokan data dalam Microsoft Excel juga mempermudah penyusunan informasi sesuai kebutuhan administrasi serta membantu meningkatkan ketelitian dalam proses pencatatan.

Pengelolaan arsip secara digital maupun semi-digital melalui penggunaan Microsoft Excel juga memberikan manfaat terhadap efektivitas administrasi. Data yang telah tersusun dengan baik memudahkan pegawai dalam melakukan penelusuran informasi, terutama ketika diperlukan untuk proses verifikasi atau penyusunan dokumen lanjutan. Meskipun dokumen fisik tetap disimpan sebagai arsip resmi, keberadaan data digital membantu mempercepat proses identifikasi dokumen berdasarkan informasi yang telah dicatat sebelumnya.

Hasil pengamatan selama PKL menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi keuangan pada Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mendukung pelaksanaan pekerjaan administrasi sehari-hari. Penggunaan Microsoft Excel sebagai media pencatatan memberikan kemudahan dalam mengelola data administrasi SPM, sedangkan pengarsipan berdasarkan jenis belanja membantu menciptakan sistem penyimpanan dokumen yang lebih teratur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, meskipun masih menggunakan aplikasi yang sederhana, tetap mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas administrasi keuangan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi proses kerja, memperbaiki kualitas pengelolaan data, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan. Dalam konteks PKL ini, penggunaan Microsoft Excel menjadi salah satu bentuk implementasi digitalisasi administrasi yang membantu pelaksanaan tugas administratif secara lebih sistematis. Meskipun demikian, efektivitas implementasi digitalisasi tetap dipengaruhi oleh ketelitian pengguna dalam melakukan input data serta kelengkapan dokumen yang menjadi dasar administrasi. Oleh karena itu, selain pemanfaatan teknologi, disiplin administrasi dan kompetensi sumber daya manusia tetap menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan administrasi keuangan.

Manfaat dan Kendala Implementasi Digitalisasi Administrasi Keuangan

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung, implementasi digitalisasi administrasi keuangan melalui pemanfaatan Microsoft Excel memberikan berbagai manfaat dalam mendukung kegiatan administrasi, khususnya pada proses input data dan pengarsipan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM). Penggunaan media digital mampu membantu penyusunan data administrasi secara lebih sistematis sehingga memudahkan pegawai dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan dokumen keuangan. Selain itu, pencatatan data secara digital mempermudah proses pembaruan data apabila terdapat perubahan informasi tanpa harus melakukan pencatatan ulang sebagaimana pada sistem manual.

Salah satu manfaat yang dirasakan selama pelaksanaan administrasi adalah meningkatnya efisiensi waktu dalam proses input data. Data berupa tanggal dan nama kegiatan dapat dicatat secara terstruktur dalam lembar kerja Microsoft Excel sehingga proses pencarian dan pemeriksaan kembali data menjadi lebih mudah. Penyusunan data dalam format tabel juga membantu menjaga kerapian administrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya data yang terlewat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital, meskipun masih sederhana, mampu memberikan kontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan administrasi keuangan pada tingkat operasional.

Selain mendukung proses pencatatan data, implementasi digitalisasi juga memberikan manfaat pada kegiatan pengarsipan dokumen SPM. Pengelompokan dokumen berdasarkan jenis belanja memudahkan proses penyimpanan dan penelusuran arsip ketika dokumen diperlukan kembali. Sistem pengarsipan yang tersusun secara sistematis membantu meningkatkan ketertiban administrasi serta mengurangi risiko kesalahan dalam penempatan dokumen. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih terorganisasi dan mendukung kelancaran pekerjaan pada Subbagian Keuangan.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, hasil observasi juga menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi administrasi keuangan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang dijumpai selama pelaksanaan PKL adalah **dokumen SPM yang belum lengkap** pada saat proses administrasi berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan proses input data maupun pengarsipan belum dapat dilakukan secara langsung karena petugas harus menunggu kelengkapan dokumen terlebih dahulu. Akibatnya, beberapa pekerjaan administrasi mengalami penundaan dan penyelesaian dokumen memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kondisi ketika seluruh persyaratan telah tersedia.

Kelengkapan dokumen merupakan aspek penting dalam administrasi keuangan karena setiap dokumen menjadi dasar pencatatan dan penyimpanan arsip. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, maka ketelitian dalam proses pemeriksaan menjadi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Oleh karena itu, koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen

keuangan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi. Selain itu, proses verifikasi sebelum dokumen diserahkan kepada Subbagian Keuangan juga dapat membantu meminimalkan kekurangan dokumen yang berpotensi menghambat pekerjaan administrasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi administrasi keuangan tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan dokumen dan ketelitian sumber daya manusia yang mengelola administrasi tersebut. Microsoft Excel sebagai media pendukung administrasi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, namun efektivitas penggunaannya tetap bergantung pada kualitas dokumen yang diterima serta kedisiplinan dalam proses administrasi. Dengan demikian, digitalisasi administrasi perlu didukung oleh prosedur kerja yang baik, koordinasi yang efektif, dan pengelolaan dokumen yang tertib agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi keuangan mampu meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat pengolahan data, dan mendukung transparansi pengelolaan administrasi. Namun demikian, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta kelengkapan data dan dokumen yang digunakan dalam proses administrasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas administrasi tidak hanya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga melalui penguatan tata kelola administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur agar proses pengelolaan keuangan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi digitalisasi administrasi keuangan pada Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi selama proses pengelolaan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM). Pemanfaatan Microsoft Excel dalam kegiatan input data dan pengarsipan dokumen berdasarkan jenis belanja membantu menciptakan proses administrasi yang lebih sistematis, mempermudah pengelolaan data, meningkatkan ketelitian pencatatan, serta mempercepat proses pencarian kembali dokumen ketika diperlukan. Meskipun menggunakan aplikasi yang sederhana, penerapan media digital tersebut telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan administrasi keuangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi administrasi keuangan masih menghadapi kendala, terutama ketika dokumen SPM yang diterima belum lengkap sehingga proses input data dan pengarsipan harus ditunda sampai persyaratan administrasi terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi tidak hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi, tetapi juga oleh kelengkapan dokumen, koordinasi antarbagian, serta ketelitian sumber daya manusia dalam melaksanakan administrasi keuangan.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung diharapkan dapat terus mengoptimalkan penerapan digitalisasi administrasi keuangan melalui peningkatan kedisiplinan dalam kelengkapan dokumen, penguatan koordinasi antarunit kerja, serta peningkatan kompetensi pegawai dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dengan langkah tersebut, proses administrasi keuangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W., Handayani, D., Putra, R., & Marisa, D. (2021). *Perancangan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan EFA (Excel for Accounting)*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 14(1).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2025). *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dimoderasi oleh Teknologi Informasi*. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 13(5).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Amalina, N. (2025). *Efektivitas Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia*. FORMULA: Jurnal Administrasi Publik.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). *Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat*. Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik.
- Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Media Birokrasi, 5(1).
- Sinulingga, E. N. (2025). *Inovasi Manajemen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD): Penguatan Ekosistem Digital untuk Akselerasi Ekonomi Daerah pada Era Digital*. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan.
- Alya, Rahmawati, I., Denatan, B., Erni, Azizah, N., & Hutahaen, E. (2026). *Penerapan Administrasi Perkantoran Berbasis Digital pada Pemerintah Daerah Kota Bandung (Studi Deskriptif di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)*. Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan, 4(2).
- Ismiyatun, I., & Sulastiningsih, S. (2026). *Evaluasi Implementasi SIPD dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi.
- Rieva, M., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Tambora*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Arifira, G., Nasrida, M. F., Takari, D., & Novianti, T. (2025). *Efektivitas Penerapan Sistem Informatika Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kota Palangka Raya*. Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi terbaru). Alfabeta.